

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH NOMOR 30
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI
DAERAH DI KABUPATEN BUOL**

Disusun dan Diajukan oleh:

SUPARMAN M. MARHUM
NIM. 710520010

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Gorontalo, April 2022

Mengetahui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 19680409 199303 2 001

Pembimbing II



Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
NIP. 19741223 200312 2 011

Ketua Program Studi Magister Hukum
Universitas Negeri Gorontalo



Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
NIP. 19741223 200312 2 011

LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

**AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH NOMOR 30
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI
DAERAH DI KABUPATEN BUOL**

TESIS

Disusun Oleh:

**SUPARMAN M. MARHUM
NIM. 710520010**

Disetujui Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Untuk Memperoleh
Gelar Magister Pada Program Studi Hukum

Menyetujui,

Pembimbing I



**Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 19680409 199303 2 001**

Pembimbing II



**Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
NIP. 19741223 200312 2 011**

Gorontalo, April 2022

Mengetahui,



**Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Gorontalo**

**Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si
NIP. 19591227 198603 2 003**

**Ketua Program Studi
Hukum**


**Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
NIP. 19741223 200312 2 011**

LEMBAR PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

**AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH NOMOR 30
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI
DAERAH DI KABUPATEN BUOL**

Disusun Oleh:
SUPARMAN M. MARHUM
NIM. 710520010

Telah Disahkan Oleh Panitia Seminar Tesis

Pada Tanggal April 2022.

KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI:

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tgl
Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH	Ketua Program Studi	
Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum	Pembimbing I	
Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH	Pembimbing II	
Dr. Fence M. Wantu, SH., MH	Penguji I	
Dr. Udin Hamim, SH., M.Si	Penguji II	

Gorontalo, April 2022

Mengetahui,

**Direktor Pascasarjana
Universitas Negeri Gorontalo**



Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si

Nip. 19591227 198603 2 003

ABSTRAK

Suparman M Marhum, Nim 710520010, Tesis, Akibat Hukum Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Program Legislasi Daerah Kabupaten Buol. Pembimbing I Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH. M. Hum. Pembimbing II Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH.

Penelitian ini bertujuan (a) Menganalisis Pemberlakuan kedudukan Peraturan daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2013 di Kabupaten Buol. (b) Menganalisis akibat hukum Pemberlakuan Peraturan daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2013 di Kabupaten Buol.

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), Penelitian jenis ini sasaran bahan utama pada data sekunder berupa bahan hukum baik bahan hukum utama (primer), bahan hukum pelengkap (sekunder), pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Peraturan Daerah atau Perda memiliki andil dalam melakukan pelaksanaan otonomi dalam daerah, maka dari itu penyusunannya harus diprogramkan sedemikian rupa, sehingga peraturan hukum Perundang-Undangan yang diperlukan untuk pelaksanaan/penerapan pada pemerintahan daerah sendiri. Peraturan Daerah nomor 30 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Program legislasi daerah, kedudukan peraturan tersebut secara subatansi sudah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, beberapa perubahan mendasar pada peraturan perundang-undangan belum tercover dalam materi muatan perda Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program legislasi Daerah, diantaranya tentang proses harmonisasi Program pembentukan perda, tata cara pelibatan partisipasi masyarakat, Analisis Kebutuhan perda, indeks Kebutuhan perda maupun proses sinkronisasi dengan Penetapan APBD.

Beberapa penyesuaia dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait diataranya Peraturan Presiden noor 87 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang=Undangan, undang-undang 15 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peratura n Perundang-undangan, Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah sebagaimana diubah dengan undang-Undang nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah.

Kata Kunci : Perda, Pembentukan, Propemperda

ABSTRACT

Suparman M. Marhum, Student ID Number 710520010, Thesis, Legal Consequences of Enforcement of Regional Regulation Number 30 of 2013 concerning Management of Regional Legislation Programs in Buol Regency. The Principal Supervisor is Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M. Hum, and the Co-supervisor is Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH.

This present research aimed at (a) Analysing the Enforcement of the Legal Standing of Regional Regulation Number 30 of 2013 in Buol Regency. (b) Analysing the Legal Consequence of Enforcement of Regional Regulation Number 30 of 2013 in Buol Regency.

It employed a normative legal research method with a statute approach. This research used secondary data in the form of legal materials, both primary legal materials and secondary legal materials. At the same time, the data collection was done through library research, while the data analysis used was qualitative descriptive analysis.

Regional Regulation, known as Perda in Indonesia, has a role in implementing autonomy within the region. Therefore, their preparation must be programmed so that the legislation is required for the implementation/application of the regional government itself. In the meantime, the legal standing of the Regional Regulation Number 30 of 2013 concerning Management of Regional Legislation Programs has not substantially been in accordance with the applicable legislation. It was observable from the fundamental changes to legislation that have not been covered in the content of the Regional Regulation Number 30 of 2013 concerning the Preparation and Management of Regional Legislation Programs, including the process of harmonization of the regional regulation establishment program, procedures for involving community participation, analysis of regional regulation needs, index of regional regulation needs, and the synchronization process with the stipulation of the APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget).

Several adjustments to the relevant legislations include Presidential Regulation Number 87 of 2011 concerning the Implementation of Laws, Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations, Law 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations, Minister of Home Affairs Regulation Number 80 of 2015 concerning the Establishment of Regional Legal Products as Amended by Law Number 120 of 2018 concerning Amendments to Law Number 80 of 2015 concerning the Establishment of Regional Legal Products.

Keywords: Regional Regulation, Establishment, Regional Regulation Establishment Program

